





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH **LEMBAGA**

: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK **UNIT KERJA**

SUB UNIT KERJA : BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

: MIKELSON DAMEK 1. Nama

: KEPALA BIDANG Jabatan

3. NHK 407293

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 750.000.000 Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/150 m2 di KOTA PALANGKA RAYA, WARISAN Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

407.000.000 Rp.

MOBIL, Honda CR-V JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI

Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	Ph.
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	at at
F. HARTA LAINNYA	Rp.	W.
Sub Total	Rp.	1.157.000.000
III. HUTANG	Rp.	KOK KEL
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.157.000.000

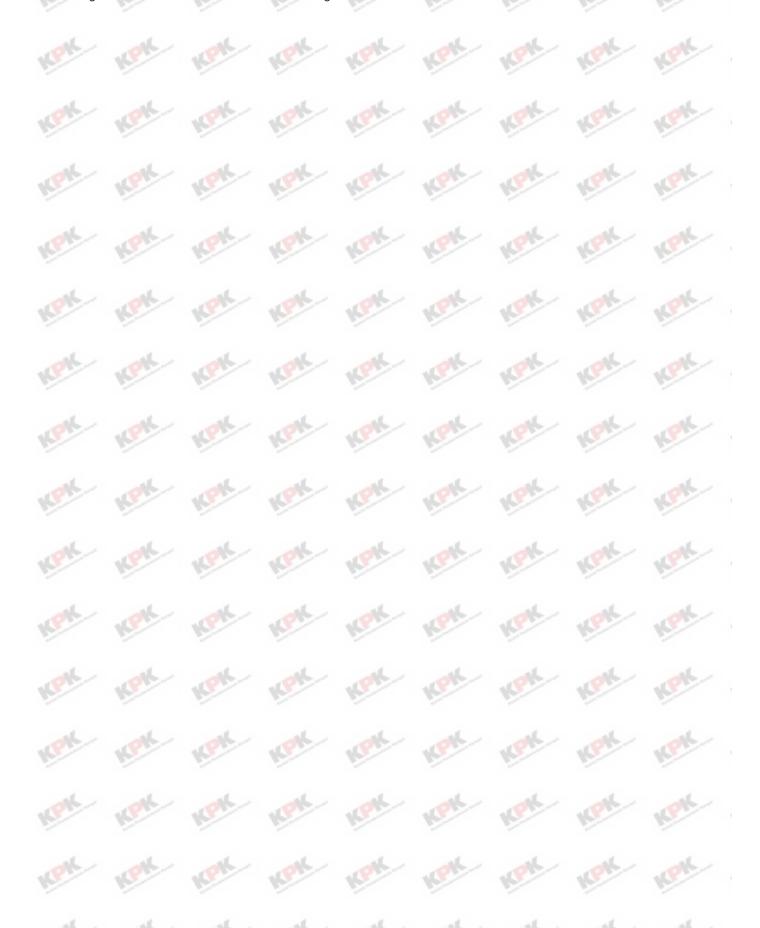
Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Juni 2020.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.







PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARI SUBAGIYO

2. Jabatan : **KEPALA SEKSI INPRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI**

3. NHK : 404718

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 764 m2/107 m2 di KOTA PALANGKA

RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 122.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

120.000.000

2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

2.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	19.000.000
D.	SURAT BERHARGA	al.	de	Rp.	46 - 36
E.	KAS DAN SETARA KAS	Kar	Kar	Rp.	15.000.000
F.	HARTA LAINNYA			Rp.	
N.	Sub Total	KPK.	WPIK-	Rp.	756.000 <mark>.0</mark> 00
III. HU	TANG			Rp.	
IV.TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	al.	016-	Rp.	756.000.000

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.







PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

: ASHADI NOOR 1. Nama

: KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI Jabatan

3. NHK 404752

II. DATA HARTA

A.	TANAH DAN BANGUNAN	S	Rp.	Kari
В.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	26.000.000
OK-	1. MOTOR, HONDA R2 Tahun 2016, HA	SIL SENDI	IRI Rp. 26.000.000	JOK JOK
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	
D.	SURAT BERHARGA	de	Rp.	- AL - AL
E.	KAS DAN SETARA KAS	Contract	Rp.	17.148.491
F.	HARTA LAINNYA		Rp.	
PK	Sub Total	PK	Rp.	43.148. <mark>4</mark> 91
III. HUT	TANG		Rp.	62.849.650
IV.TOT	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	al.	Rp.	-19.701.159
100			4	

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.